

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk semakin terbuka dan transparan dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk mampu menyediakan pelayanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga akuntabel dan efisien. Pelayanan publik yang baik akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti pengurusan dokumen administrasi, perizinan, dan layanan kependudukan.

Sejalan dengan tuntutan zaman, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan pelayanan yang lebih responsif dan prima. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan dalam proses pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan segala bentuk layanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat diakses oleh masyarakat secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Penerapan TIK dalam pelayanan publik juga berfungsi untuk meminimalisasi praktik birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan efisiensi waktu. Selain itu, penggunaan teknologi yang tepat dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahan administrasi serta meningkatkan akurasi data. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah dalam bidang teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Era digital ini, pelayanan publik yang berbasis teknologi juga memungkinkan terjadinya partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga dapat memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*),

di mana keterbukaan dan akuntabilitas menjadi dua pilar utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik tidak hanya merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan begitu, diharapkan pelayanan publik di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat terus berkembang dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Teknologi Informasi Komunikasi merupakan suatu proses pengolahan data informasi yang di sebarakan melalui media massa. Adapun pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan atau lebih di kenal dengan *e-government* yang merupakan salah satu Upaya pemerintah untuk melakukan suatu layanan yang bersifat inovatif, transparan, dan akuntabel maka, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam administrasi dan layanan yang ada di pemerintahan ini juga merupakan suatu konsep dasar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Di Indonesia *e-government* merupakan suatu Upaya yang mengembangkan penyelenggaraan informasi dan pelayanan dalam pemerintahan yang berbasis elektronik, serta suatu layanan yang memudahkan publik atau pemerintahan secara adil dan merata bagi masyarakat, dunia usaha, pemerintah, untuk memanfaatkannya teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah. tujuan dengan penyelenggaraan *e-government* ini untuk menciptakan tata Kelola instansi yang baik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi.

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan tonggak penting dalam transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Kebijakan ini menandai pergeseran dari era *E-Government* menuju *I-Government (integrated government)*, dengan tujuan

menciptakan pemerintahan yang terintegrasi secara utuh untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Implementasi SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus menyediakan layanan publik yang berkualitas, efisien, dan terpercaya.

Transformasi menuju SPBE memerlukan integrasi berbagai komponen penting dalam tata kelola pemerintahan, yang mencakup enam aspek utama. Pertama, Tata Kelola *SPBE*, yang melibatkan perumusan kebijakan, pengaturan, dan mekanisme pengendalian pelaksanaan SPBE agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kedua, Manajemen *SPBE*, yang mencakup pengelolaan sumber daya, baik manusia, teknologi, maupun informasi untuk mendukung operasional SPBE. Ketiga, Layanan *SPBE*, yang berkaitan dengan berbagai layanan digital yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat guna meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan publik.

Infrastruktur *SPBE* menjadi pondasi teknis dari sistem ini, yang mencakup jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem keamanan yang diperlukan untuk mendukung operasional SPBE secara optimal. Kelima, penyelenggara *SPBE*, yang merujuk pada lembaga atau pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi dan pengelolaan SPBE di berbagai tingkatan pemerintahan. Terakhir, Pemantauan dan Evaluasi SPBE diperlukan untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sekaligus memberikan ruang untuk perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi kinerja. SPBE diharapkan mampu memperkuat sinergi antar lembaga pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan SPBE yang optimal memerlukan kajian yang berkala untuk memastikan bahwa kebijakan Tata Kelola yang menghasilkan kinerja tinggi telah dilaksanakan hambatan sekaligus permasalahan yang timbul setelah

diberlakukannya kebijakan SPBE akan lebih cepat dan mudah untuk diselesaikan serta peluang untuk perkembangannya lebih mudah dan cepat.

Merujuk pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berperan penting dalam memperkuat tata Kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati No 2 tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bekasi pada pasal 3 bahwasannya pemerintah daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.

Berdasarkan tahun 2022, Kabupaten Bekasi menyanggah kategori "kurang" dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kategori ini dapat dibuktikan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023, yang merinci hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah selama tahun 2022.

Keputusan tersebut mencerminkan adanya sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan SPBE secara efektif. Kategori "kurang" ini menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek penting dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang belum memenuhi standar yang diharapkan, baik dari segi infrastruktur, kualitas layanan, maupun kemampuan sumber daya manusia.

Hasil evaluasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi SPBE di Kabupaten Bekasi, serta menegaskan perlunya langkah-langkah perbaikan yang komprehensif untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan SPBE. Dengan pemantauan yang berkelanjutan dan komitmen untuk memperbaiki kelemahan yang ada, diharapkan Kabupaten Bekasi dapat bertransformasi menjadi

instansi yang lebih baik dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Berikut merupakan tabel hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada Instansi pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2022

Tabel 1. 1 Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pada Instansi Pemerintah Pusat Dan Daerah Tahun 2022

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3,37	Baik
2	Pemerintah Kab. Bogor	3,33	Baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	2,29	Cukup
4	Pemerintah Kab. Cianjur	2,37	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bekasi	1,71	Kurang
6	Pemerintah Kab. Karawang	3,08	Baik
7	Pemerintah Kab. Purwakarta	2,28	Cukup
8	Pemerintah Kab. Subang	2,35	Cukup
9	Pemerintah Kab. Bandung	2,82	Baik
10	Pemerintah Kota Banjar	2,38	Cukup

Sumber: *Keputusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 108 tahun 2022*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa tahun 2022 kabupaten Bekasi salah satu instansi yang memiliki predikat “kurang” dalam indeks SPBE dari 25 instansi pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Menurut kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, indeks SPBE Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 mengalami lonjakan yang signifikan dari nilai 1,71 menjadi 3,28 dengan peningkatan sebesar 1,57. Laporan evaluasi SPBE tahun 2023 menunjukkan bahwa peningkatan ini menempatkan kabupaten Bekasi dalam kategori “Baik” dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronika, berikut tabel hasil evaluasi SPBE pemerintahan daerah di Jawa Barat tahun 2023 (Menteri PanRB, 2023)

Tabel 1.2 Hasil evaluasi SPBE pemerintah daerah di Jawa Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,14	Sangat baik
2	Pemerintah Provinsi Kab. Bogor	3,71	Sangat baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	3,08	Baik
4	Pemerintah Kab. Cianjur	3,05	Baik
5	Pemerintah Kab. Bekasi	3,28	Baik

sumber: *laporan evaluasi kemenpanRB tahun 2023*

Berdasarkan Tahun 2023 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan yang signifikan dengan kenaikan indeks sebesar 1,57 dan berhasil meraih predikat “baik.” Meskipun demikian terhadap nilai indeks SPBE di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa Domain yang belum mencapai Tingkat kematangan yang diharapkan.

Tabel 1.3 Nilai Indeks SPBE di Kabupaten Bekasi 2023

Domain Tata Kelola SPBE	: 2,7
Perencanaan Strategis SPBE	: 2,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 2,75
penyelenggaraan SPBE	: 3

Sumber : *Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kab.Bekasi 2023 (Diolah Peneliti)*

Berdasarkan Tabel 1.3 Secara spesifik, Domain Tata Kelola SPBE mencatat Nilai 2,7 dilihat dari tabel tersebut pada domain tata Kelola SPBE masih rendah. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa domain tersebut masih berada dibawah kematangan yang diinginkan.

Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus dan Upaya perbaikan dalam pengelolaan Tata Kelola SPBE, agar dapat memenuhi kriteria

kematangan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Tabel 1.4 Nilai indeks SPBE di Kabupaten Bekasi 2024

Domain Tata Kelola SPBE	: 3,50
Perencanaan strategis SPBE	: 3,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 3,50
Penyelenggaraan SPBE	: 4,50

Sumber : *Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kab.Bekasi 2024 (Diolah Peneliti)*

Berdasarkan pada tabel 1.4 bahwasannya pada tahun 2024 domain tata Kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kab.Bekasi mengalami kenaikan menjadi 3,50 dimana hal ini dapat dilihat dari laporan hasil evaluasi pemerintahan Kab.Bekasi tahun 2024.

Bersadarkan pada tabel 1.5 bahwasannya masih terdapat indikator yang nilai Tingkat levelnya masih dibawah nilai yang diinginkan Berdasarkan informasi yang ditemukan bahwa dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bekasi masih terdapat permasalahan yang ditemukan, tampak belum lengkapnya muatan pada dokumen peta rencana yang mengakibatkan sebagian penerapan SPBE tidak memiliki perencanaan dan pedoman., indikator yang masih kurang ini karena pelaksanaan nya baru dilakukan oleh beberapa dinas, serta sulit untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait, Selain itu, bukti pendukung atau data yang tersedia masih terbatas, dan belum melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada perangkat daerah.

Tabel 1. 5 Nilai Indikator Domain Tata Kelola SPBE 2024

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Tata Kelola SPBE	Level
Aspek 2 -	Perencanaan Strategis SPBE	
Indikator 2.1	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah	4
Indikator 2.2	Tingkat Kematangan peta rencana SPBE instansi pusat/daerah	4
Indikator 2.3	Tingkat Kematangan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE	2
Indikator 2.4	Tingkat Kematangan Inovasi proses Bisnis SPBE	3
Aspek 3-	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	
Indikator 3.1	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
Indikator 3.2	Tingkat Kematangan Pusat Layanan Data	4
Indikator 3.3	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	4
Indikator 3.4	Tingkat Kematangan penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah	3
Aspek 4-	Penyelenggaraan SPBE	
Indikator 4.1	Tingkat Kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE instansi pusat/ pemerintah daerah	5
Indikator 4.2	Tingkat Kematangan kolaborasi penerapan SPBE	4

Sumber : *Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kab.Bekasi 2024 (Diolah Peneliti)*

Dampak yang terjadi dalam SPBE ini yakni dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara optimal, sehingga terciptanya kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap pemerintah sehingga upaya peningkatan dalam tata Kelola pemerintahan ini juga berfungsi sebagai dasar untuk membangun sistem administrasi yang lebih responsive dan efisien

Berdasarkan permasalahan serta data pada paragraf sebelumnya penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Kebijakan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Komunikasi, Informasi Dan Statistik Kabupaten Bekasi”**. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Tata Kelola Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informasi, persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kematangan SPBE dan bagaimana Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Peneliti harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung peningkatan kualitas SPBE di Kabupaten Bekasi, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mendorong tata Kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan berbasis teknologi. penerapan SPBE di kabupaten menunjukkan kemajuan, namun sejumlah indikator tata Kelola masih dibawah standar. Permasalahan seperti lemahnya koordinasi keterbatasan data dan minimnya sosialisasi menghambat efektivitas implementasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, dapat diidentifikasi bahwa berbagai permasalahan yang timbul dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengimplementasian kebijakan masih sulit melakukan komunikasi untuk koordinasi dengan dinas lain, sehingga pelaksanaannya belum dapat berjalan secara optimal.
2. Indikator pada Domain Tata Kelola masih menunjukkan kekurangan, karena pelaksanaannya hanya dilakukan oleh sebagian dinas.
3. Kebijakan masih menghadapi keterbatasan bukti pendukung atau data yang tersedia sehingga meghambat proses evaluasi dan pengambilan Keputusan berbasis data.
4. Belum dilaksanakannya sosialisasi yang menyeluruh kepada staf serta perangkat daerah sehingga dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan kebijakan secara efektif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang diatas, rumusan permasalahan dapat dirumuskan untuk penelitian Implementasi Kebijakan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi:

1. Bagaimana Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai permasalahan Implementasi Kebijakan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi.

1. Untuk mengetahui komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi

2. Untuk mengetahui Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi
3. Untuk mengetahui Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar sistem pemerintah berbasis elektronik dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kematangan SPBE serta Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Serta dapat digunakan untuk referensi penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

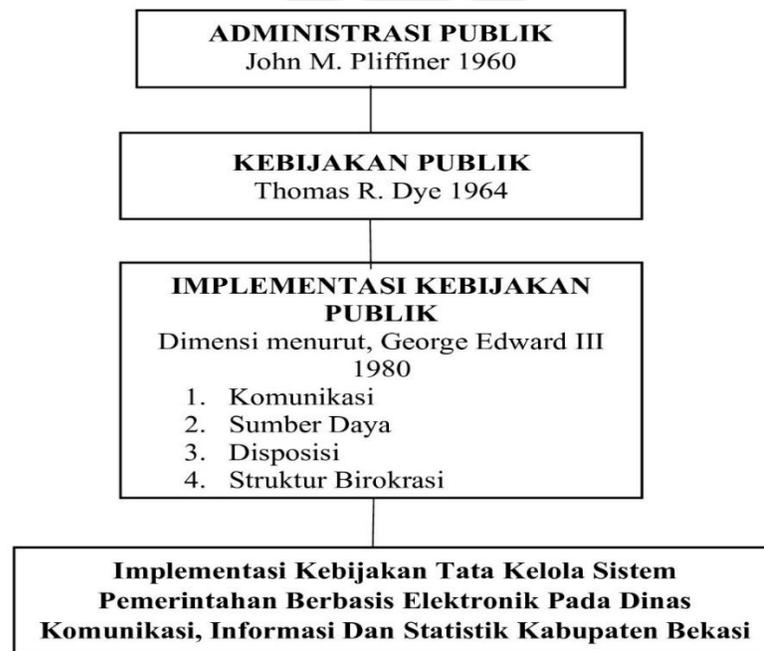
2. Kegunaan Teoritis

Pengetahuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada evaluasi implementasi kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan, melengkapi, memelihara dan mengembangkan praktik-praktiknya. Selain itu, bagi peneliti di masa mendatang, hasil ini dapat menjadi acuan atau masukan yang relevan dalam mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan isu-isu serupa.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi *E-Government* salah satunya adalah kesiapan infrastruktur teknologi di kabupaten Bekasi. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan yakni regulasi yang mendukung, regulasi yang jelas dan terarah akan memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan ini. selain itu, perlu juga dipertimbangkan dukungan politik dan komitmen dari para pemangku kepentingan, baik Tingkat lokal maupun nasional, agar berjalan dengan efektif.

Untuk memudahkan peneliti dalam menjalankan proses penelitian terkait implementasi kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Bekasi, peneliti merumuskan sebuah kerangka berpikir yang komprehensif. Kerangka berpikir ini merupakan representasi konseptual dari permasalahan yang diteliti, yang didasarkan pada tinjauan literatur yang relevan.



Gambar 1. 6 Kerangka Berpikir

Sumber : *Diolah peneliti 2025*